

Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Indonesia*

Suhadi MANGKUSUWONDO

Pertumbuhan dan Saling Ketergantungan yang Makin Kuat

DASAWARSA 1980-an yang lalu membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada banyak negara Asia Timur dan Tenggara. Bahkan sebenarnya di bagian dunia ini pembangunan ekonomi berlangsung dalam beberapa gelombang yang berurutan semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Gelombang pertama pertumbuhan ekonomi yang pesat dimulai oleh Jepang dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, yang diikuti oleh gelombang kedua pada dasawarsa 1970-an dari pembangunan Negara-negara Industri Baru (NIB) Asia, dan disusul gelombang ketiga di pertengahan kedua dasawarsa 1980-an pembangunan

RRC dan ASEAN. Rakyat di negeri-negeri ini mungkin sekarang terbiasa menyaksikan tumbuhnya perekonomian mereka dari tahun ke tahun dan karenanya cenderung memandang perluasan ekonomi sebagai hal biasa.

Anggapan demikian jelas terlalu picik dan seenaknya, karena perekonomian yang mengalami pertumbuhan pesat untuk jangka waktu yang lama akhir-akhir ini hanya dapat ditemukan di sejumlah terbatas negara, terutama di Asia Timur dan Tenggara. Banyak negara berkembang di bagian dunia yang lain, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri dari keadaan tertekan selama lebih dari satu dasawarsa. Untuk sebagian besar rakyat di negeri-negeri itu keadaan stagnasi telah menjadi pengalaman sehari-hari, dan kebanyakan dari mereka harus menderita penurunan tingkat pendapatan yang terus-menerus.

Penampilan yang kontras antara perekonomian Asia di satu pihak dan ekonomi-

*Diterjemahkan oleh Sunarto Ndaru Mursito dari makalah Suhadi Mangkusuwondo, "Pacific Economic Cooperation and Indonesia" yang disampaikan dalam suatu kuliah umum yang diselenggarakan oleh The International Development Center of Japan (IDCJ), Tokyo, 23 Maret 1990.

an Afrika dan Amerika Latin di lain pihak belakangan ini menarik banyak perhatian. Semakin banyak pengkajian dilakukan untuk memahami sebab-sebab yang mendasari pengalaman yang berbeda itu. Konsensus yang muncul di antara para ekonom tampaknya menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahlah sebagai faktor terpenting yang menyebabkan berbedanya penampilan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang.

Negara-negara Asia Timur dan Tenggara berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi mereka melewati dasawarsa penuh gejolak 1970-an dan melewati resesi awal dasawarsa 1980-an, terutama karena mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meraih manfaat maksimal dari keuntungan perdagangan internasional. Tatkala masa-masa sulit datang menjelang berakhirnya tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an, negara-negara ini cepat menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan pada pembeli dalam negeri saja untuk menjadi tempat pemasaran yang memadai kalau mereka ingin meneruskan perkembangan sektor industri mereka yang baru tumbuh. Bagi perekonomian yang kecil seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan kesadaran ini timbul secara alamiah, tetapi bagi masyarakat ekonomi yang lebih besar seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia ternyata kesadaran untuk menyesuaikan diri pun tidak membutuhkan waktu lama.

Negara-negara ini secara hampir bersamaan memutuskan bahwa penyesuaian-penyesuaian struktural dan pembaruan-pembaruan kebijakan harus dijalankan menghadapi resesi dan perubahan-perubahan struktur perdagangan internasional yang menyertainya. Yang terpenting di antara ke-

bijakan pembaruan adalah pembaruan dalam kebijakan perdagangan. Semua negara ini sebelumnya menjalankan kebijakan-kebijakan perdagangan protektif berorientasi ke dalam negeri, yang bertujuan mendorong berkembangnya industri manufaktur di dalam negeri. Sekarang, untuk menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan mereka memutuskan untuk menembus pasaran internasional juga. Satu persyaratan untuk itu adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan-kebijakan perdagangan dan industri adalah perlu untuk mendorong peningkatan masuknya modal, keahlian (ilmu) dan teknologi, dan meningkatkan efisiensi dengan memberi lebih banyak peluang persaingan dalam perekonomian nasional.

Jadi suksesnya perekonomian Asia Timur dan Tenggara dapat dikatakan akibat kebijakan perdagangan mereka yang berorientasi ke luar negeri dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi keberhasilan kebijakan-kebijakan itu dapat diragukan, kalau pasaran-pasaran utama di negara-negara industri maju tidak bertambah besar dan tidak menyerap peningkatan ekspor dari kawasan itu. Khususnya pasaran luas AS dan sedikit banyak pasaran Eropa Barat, merupakan penyerap penting untuk perkembangan ekspor Asia, terutama ekspor barang-barang manufaktur, selama masa-masa sulit tahun 1970-an dan 1980-an. Bahkan ketika timbul sentimen-sentimen proteksionis di AS dan Eropa Barat, ekspor dari Asia Timur dan Tenggara masih terus tumbuh mengesankan yang dengan demikian memungkinkan negara-negara di situ mempertahankan pertumbuhan mereka yang pesat.

Dengan mengakui pentingnya peranan pasaran negara-negara industri utama, khu-

susnya AS, orang harus juga mengakui bahwa sementara perekonomian mereka berkembang, negara-negara Asia Timur dan Tenggara ini sendiri juga meningkat impornya secara substansial, dan dengan demikian menciptakan pasaran-pasaran baru untuk volume perdagangan dunia yang semakin besar. Maka di saat kita memasuki dasawarsa 1990-an, perdagangan di antara negara-negara Asia Pasifik menjadi jauh lebih berimbang daripada satu dasawarsa sebelumnya. Peranan pasar AS, meskipun masih sangat penting, tidak lagi sedominan seperti sebelumnya.

Ini dapat diperlihatkan misalnya dengan kasus Indonesia. Selama bertahun-tahun Amerika merupakan pasar utama untuk ekspor Indonesia. Akan tetapi, sejak kira-kira 5 tahun yang lalu Jepang telah menjadi pasar yang terbesar. Bahkan walaupun kita mengecualikan minyak dan gas bumi, sekarang Jepang adalah pasar terbesar untuk ekspor Indonesia. Pada tahun 1989 bagian Jepang dalam ekspor non-migas Indonesia adalah sekitar 26% dibanding bagian AS, pasar terbesar kedua, sebesar 15%. NIB Asia dan ASEAN juga telah muncul sebagai pasaran-pasaran yang besar. Ekspor ke negara-negara ini menunjukkan pertumbuhan mengesankan selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam tahun 1990-an negara-negara Asia Timur dan Tenggara, termasuk Jepang, akan menjadi mitra-mitra dagang Indonesia yang terpenting.

Apa artinya semua ini ialah bahwa perekonomian Asia Timur dan Tenggara telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi selama masa-masa yang sulit, oleh karena pertama, berkonsentrasi pada produk-produk manufaktur dan kedua, konsentrasi ekspor ke sejumlah negara Asia-Pasifik tertentu. Ini berarti terjadi pening-

katan saling ketergantungan di antara perekonomian negara-negara ini selama satu setengah dasawarsa terakhir. Perdagangan mereka telah menjadi lebih terkonsentrasi di dalam kawasan ini.

Angka-angka statistik, misalnya, menunjukkan bahwa perekonomian negara-negara PECC (*the Pacific Economic Cooperation Conference* yang meliputi 15 negara plus pulau-pulau di Pasifik) mengekspor 65,8% dari seluruh ekspor mereka pada 1988 ke kawasan ini, yaitu meningkat dari 54,4% pada 1970. Ekspor dunia ke negara-negara PECC meliputi sebesar 38,7% dari seluruh jumlah ekspor dunia, meningkat dari 31,4% pada 1970. Bagian ekspor Jepang ke kawasan PECC dari keseluruhan eksportnya meningkat dari 61,3% menjadi 66,8% (pada 1970 ke 1988), bagian Kanada meningkat dari 70,0% menjadi 82,2%, bagian AS dari 40,1% menjadi 50,6%, bagian Singapura dari 59,3% menjadi 72,7% dan bagian Indonesia dari 80,5% menjadi 83,2%.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, semakin berkonsentrasinya perdagangan ke dalam kawasan telah memungkinkan negara-negara Asia Timur dan Tenggara mempertahankan tingkat pertumbuhannya, tetapi dengan demikian juga meningkatkan kerawanan mereka. Itu berarti bahwa bila terjadi kegoncangan ekonomi atau politik yang tak terduga di kawasan, mereka tidak mudah beralih ke pasaran-pasaran alternatif di luar kawasan, ke Eropa Timur atau Barat, ke Amerika Latin atau Afrika, jikalau negara-negara lain ini tidak berhasil mempercepat tingkat pertumbuhan mereka secara substansial. Maka itu merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara Asia, bahwa kawasan-kawasan dunia yang lain juga mengembangkan perekonomian mereka bersama dengan perekonomian Asia-Pasifik.

Kebutuhan untuk Kerjasama dalam Kawasan

Pertumbuhan yang pesat disertai oleh perubahan-perubahan cepat dalam struktur industri. Ini berimplikasi terus terjadinya perubahan keunggulan komparatif dari perekonomian Asia-Pasifik, yang menyebabkan terus terjadinya perubahan komposisi impor dan ekspor mereka. Maka pertumbuhan yang pesat selain diiringi oleh meningkatnya volume juga oleh terus berubahnya pola perdagangan.

Maka tidaklah mengherankan jikalau, ketika saling ketergantungan di antara ekonomi-ekonomi Asia-Pasifik meningkat, orang menjadi makin menyadari keperluan untuk menjamin kelancaran dan kontinuitas tukar-menukar barang, modal, keahlian, dan teknologi di antara negara-negara ini. Makin lama semakin banyak orang melihat adanya kebutuhan akan suatu mekanisme atau forum yang dapat menjadi saluran komunikasi yang teratur di antara pemerintah-pemerintah maupun di antara sektor-sektor swasta, untuk menjamin agar arus perdagangan, penanaman modal, dan alih teknologi di kawasan ini dapat berlangsung tanpa hambatan. Satu keprihatinan khusus adalah kembali munculnya proteksionisme dan meningkatnya usaha melakukan tindakan pembalasan dalam perdagangan.

Sejumlah prakarsa telah diambil, bermula sejak 1960-an, untuk menciptakan mekanisme kerjasama dalam bidang perdagangan, keuangan, dan bidang-bidang lain, oleh organisasi-organisasi swasta, pemerintah, maupun para akademisi. Yang terakhir, dan yang paling penting di antaranya, adalah pertemuan tingkat menteri dari 12 negara Asia-Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia, pada 6 sampai 7 November 1989.

Pertemuan itu yang dikenal sebagai pertemuan para menteri APEC (*the Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan usaha serius yang pertama oleh pemerintah-pemerintah untuk memikirkan kemungkinan menciptakan suatu forum antar pemerintah guna konsultasi dan kerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan kawasan. Beberapa kesepakatan di antara para partisipan telah dicapai pada pertemuan di Canberra, yang terpenting adalah mengenai perundingan perdagangan multilateral yang sedang berlangsung (*the Uruguay Round*).

Dalam pernyataan mereka yang disiarkan di akhir pertemuan, para menteri menyatakan bahwa setiap negara yang diwakili pada pertemuan itu sangat mengandalkan ekonominya pada sistem perdagangan multilateral yang kuat dan terbuka, dan tak satu pun memikirkan agar Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) diarahkan untuk membentuk suatu blok perdagangan. Para menteri menyampaikan dukungan yang kuat untuk penyelesaian Uruguay Round yang berhasil dan tepat pada waktunya. Mereka berpendapat bahwa banyak yang masih harus dilakukan jika penutupan Desember 1990 yang sukses mau dicapai. Sebab itu, mereka sepakat agar para menteri yang mengurus kebijakan perdagangan hendaknya mengadakan pertemuan di awal September 1990 untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah dicapai dan memikirkan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi suatu hasil MTN (*Multilateral Trade Negotiations*) yang komprehensif dan ambisius. Maka mereka akan mengadakan pertemuan lagi di Brussel pada awal Desember menjelang sidang penutupan Uruguay Round. Sementara itu, para pejabat senior akan berkonsultasi secara teratur di Geneva untuk bertukar pandangan demi kemajuan MTN.

Bagi Indonesia, dan kebanyakan negara berkembang, kesepakatan yang dicapai di Canberra mengenai masalah perdagangan multilateral adalah sangat penting. Indonesia menilai bahwa pembentukan suatu blok perdagangan di Asia-Pasifik tidak akan menguntungkan kepentingan jangka panjangnya. Untuk menjamin agar pertumbuhan ekonominya dapat dipertahankan, Indonesia membutuhkan akses berkesinambungan tidak hanya memasuki pasaran AS, Jepang, dan NIB Asia melainkan juga memasuki pasaran Eropa Barat dan Timur, Amerika Latin, dan juga bagian-bagian dunia yang lain. Pembentukan suatu blok perdagangan regional mungkin akan mendorong blok-blok perdagangan yang lain melakukan tindakan-tindakan dagang yang diskriminatif. Indonesia tidak akan mendapat keuntungan dari suasana perdagangan demikian, dan perdagangan dunia pun akan menderita. Kesepakatan yang dicapai di Canberra untuk mengadakan usaha-usaha bersama mempertahankan dan memantapkan sistem perdagangan multilateral GATT, oleh karenanya, sangat sejalan dengan strategi perdagangan Indonesia.

Ini tidak berarti bahwa telah ada kesepakatan sepenuhnya di antara negara-negara Asia-Pasifik mengenai pemecahan segala masalah dalam agenda Uruguay Round mengenai MTN yang sedang berlangsung. Sejumlah persoalan perlu segera dipecahkan jika Uruguay Round mau ditutup dengan sukses pada akhir 1990. Satu persoalan yang penting bagi Indonesia adalah perniagaan tekstil. Karena Indonesia masih berada pada tahap awal industrialisasi, maka tekstil dan pakaian jadi memainkan peranan sangat penting dalam kegiatan ekspornya. Sebab itu, pembatasan-pembatasan yang sekarang ada pada tata niaga tekstil memasuki pasaran-pasaran utama di bawah pengatur-

an MFA (*Multifiber Arrangements*) perlu diperlonggar, dan tata perdagangan tekstil hendaknya dikembalikan ke dalam sistem GATT. Sangatlah penting bagi Indonesia bahwa dapat segera dicapai kesepakatan mengenai berapa lamanya dibutuhkan waktu untuk mengintegrasikan perdagangan tekstil ke dalam sistem GATT dan mengenai tata cara proses transisi itu.

Persoalan lain yang penting adalah mengenai komoditas pertanian. Pada dasarnya Indonesia dapat menyetujui gagasan supaya perdagangan komoditas pertanian juga secara bertahap dimasukkan dalam sistem GATT. Meskipun begitu, menyangkut bahan pangan pokok, seperti padi, Indonesia memberi prioritas tinggi dalam keseluruhan rencana pembudidayanya demi menjamin pemasokannya yang memadai. Pemenuhan pasok bahan pangan ini menentukan stabilitas negara, di mana tanpa stabilitas politik maupun ekonomi tidaklah dimungkinkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus dibenarkan adanya bantuan Pemerintah kepada sektor pertanian, termasuk subsidi-subsidi seperti subsidi pupuk atau kredit dengan syarat lunak bagi para petani, khususnya para petani padi.

Lagi persoalan lain adalah produk-produk tropis, termasuk buah-buahan tropis, kayu tropis, dan minyak atau lemak tropis. Karena produk-produk tropis kebanyakan dihasilkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, seharusnya negara-negara yang telah maju dapat menyetujui menghapuskan semua hambatan tarif dan non-tarif atas impor mereka pada produk-produk ini, termasuk bahan yang telah diolah atau setengah diolah.

Persoalan-persoalan lain yang menjadi kepentingan kebanyakan negara industri

maju meliputi hak-hak milik intelektual (IPR - *Intellectual Property Right*) dan perdagangan jasa-jasa. Berkenaan dengan perlindungan IPR, kebanyakan negara yang sedang berkembang berkepentingan dengan berlanjutnya akses pada teknologi, dan ingin agar perlindungan IPR tidak akan menjadi sarana untuk membatasi alih teknologi kepada negara-negara ini. Menyangkut perdagangan jasa-jasa, beberapa sektor jasa mempunyai kepentingan strategis untuk pembangunan mereka, dan bahkan esensial untuk keamanan nasional mereka. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa kebanyakan negara yang sedang berkembang enggan untuk memberi kebebasan penuh kepada perusahaan-perusahaan asing mendirikan industri-industri jasa di negara mereka.

Itulah beberapa persoalan yang menonjol pada MTN sekarang ini. Sebagaimana telah dinyatakan, adalah mengembirakan bahwa Pertemuan APEC di Canberra telah bersepakat untuk melakukan usaha-usaha bersama agar MTN sekarang ini menuju suatu penutupan yang sukses. Seyogianya semua pihak yang berkepentingan mendukung usaha yang penting ini.

ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Pasifik

Kesepakatan mengenai pendirian bersama tentang MTN GATT merupakan prestasi penting dari Pertemuan APEC di Canberra. Namun pertemuan ini tak berhasil memecahkan masalah bagaimana melembagakan APEC. Satu kesukarannya berasal dari kekhawatiran ASEAN akan kemungkinan menurunnya landasan kerjasama ASEAN sendiri.

Negara-negara anggota ASEAN, atau setidak-tidaknya Indonesia, selalu memaan-

dang kerjasama ASEAN sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri mereka. ASEAN, sejak dari awalnya, telah berhasil menciptakan suatu lingkungan yang stabil dan damai di kawasan. Berdasarkan ini negara-negara anggotanya dimungkinkan melaksanakan program-program pembangunan nasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyatnya. Maka ASEAN diakui mempunyai arti strategis, karena tanpa ASEAN tidak akan ada stabilitas di kawasan dan tanpa stabilitas tidak akan ada kemakmuran. Meskipun hasil-hasil dalam kerjasama perdagangan, industri, dan bidang-bidang yang lain sejauh ini sangat tidak memenuhi harapan, namun ASEAN mempunyai arti vital dalam konteks keseluruhan kebijakan luar negeri dari kawasan ini.

Itulah alasan mengapa Indonesia, misalnya, mengkhawatirkan kemungkinan menurunnya atau melemahnya kerjasama ASEAN jika ASEAN bergabung dalam suatu kelompok kerjasama yang lebih besar seperti APEC. Terutama jika APEC didominasi oleh salah satu atau kedua raksasa ekonomi: Jepang dan Amerika, adalah bahaya bahwa ASEAN akan kehilangan identitasnya dan dengan itu hilang pula perekat yang mengikat mereka selama ini.

Orang harus melihat ketakutan ini tidak sebagai melulu *xenophobia*, karena bagaimanapun ASEAN, sebagai suatu asosiasi, masih relatif muda. Dia membutuhkan pemupukan yang terus-menerus oleh semua negara anggotanya untuk melawan tekanan-tekanan dari luar baik ekonomi maupun politik yang mungkin memecah-belah mereka. Barangkali diperlukan waktu lebih daripada satu generasi sebelum solidaritas regional berakar dan menjadi kesadaran nasional dalam masyarakat ASEAN pada umumnya.

Amerika Serikat dan Jepang tampaknya amat menyadari kepekaan di ASEAN tersebut. Kedua negara raksasa ekonomi ini sangat hati-hati dalam pendekatannya untuk pembentukan suatu forum Pasifik, dan menghindari timbulnya kesan bahwa mereka akan memaksakan hegemoni mereka di kawasan. Maka bukanlah merupakan kebetulan semata bahwa kesempatan diberikan kepada Australia, sebagai negara berkekuatan sedang, untuk mengambil inisiatif menyelenggarakan Pertemuan APEC Pertama yang dihadiri para delegasi bertingkat menteri.

Selama acara diskusi-diskusinya, para menteri APEC memberi perhatian pada kekhawatiran ASEAN, antara lain, dengan menyetujui bahwa salah satu prinsip dalam usaha kerjasama Asia-Pasifik ialah komitmen untuk membuka dialog terbuka dan konsensus, dengan penghargaan yang sama terhadap pandangan dari semua anggotanya. Selain itu, disetujui bahwa dalam kerjasama akan diakui adanya keanekaragaman di kawasan, termasuk berbeda-beda nya sistem sosial dan ekonomi serta tingkat perkembangan masing-masing.

Mengenai kelembagaan APEC, ASEAN lebih suka menggunakan mekanisme dialog yang sudah ada antara ASEAN dan mitra-mitra dialognya, yang lazim disebut PMC (*Post-Ministerial Conference*), sebagai forum untuk konsultasi-konsultasi APEC. PMC bertemu setiap tahun, dihadiri oleh para menteri luar negeri enam negara ASEAN dan para mitra dialognya: AS, Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan New Zealand. Dalam pandangan ASEAN, forum ini hendaknya digunakan untuk melakukan konsultasi-konsultasi APEC; dengan ditambah anggota baru seperti Korea.

Sebagaimana disebutkan di depan, tidak tercapai persetujuan final pada pertemuan di Canberra menyangkut masalah kelembagaan ini. Sekalipun demikian, pertemuan menyepakati agar kerjasama sebaiknya melengkapi dan berpangkal pada, dan tidak memperkecil arti, organisasi-organisasi yang telah ada di kawasan, termasuk badan-badan resmi antar pemerintah seperti ASEAN maupun badan-badan konsultasi tidak resmi seperti Konferensi Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC). Dengan pengertian itu, semestinya dapat segera dicapai suatu persetujuan mengenai pendirian organisasi APEC, dengan kaitan kerjasama yang erat dengan ASEAN, PECC, dan lembaga-lembaga serupa yang lain yang ada di kawasan.

Masalah keanggotaan merupakan persoalan lain yang sulit. Karena APEC adalah suatu badan antar pemerintah, dapatlah dimengerti bahwa tidak akan mudah memutuskan negara-negara mana akan diperbolehkan untuk ikut serta. Tak seorang pun akan meragukan pentingnya perdagangan Cina, Hongkong, dan Taiwan di kawasan. Akan tetapi, masih perlu ditemukan suatu perumusan yang dapat disetujui oleh semuanya untuk mengikutsertakan ketiga negara ini. Partisipasi Uni Soviet dalam APEC bahkan barangkali akan lebih sulit lagi diputuskan. Beberapa negara Amerika Latin pun telah menyatakan minatnya turut bergabung, tetapi anggota-anggota lain masih harus memberikan persetujuannya berdasarkan kuatnya kaitan-kaitan ekonomi mereka dengan kawasan ini.

Atas dasar pengalaman yang lalu, pemerintah-pemerintah memerlukan banyak waktu untuk menyetujui masalah-masalah yang peka secara politik seperti itu. Karena alasan itu adanya organisasi-organisasi non-

pemerintah, seperti PECC, besar artinya karena sebagai lembaga non-pemerintah jauh lebih mudah membuat keputusan mengenai keanggotaan. Negara-negara yang berkepentingan ekonomis dengan kawasan secara mudah dapat bergabung dalam PECC dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang menyangkut masalah-masalah kawasan, sebelum APEC dapat memutuskan untuk mengikutsertakan mereka atau tidak dalam kegiatan resmi APEC. Ciri PECC yang *tri-partit* dan informal memungkinkan forum ini lebih bebas mendiskusikan kebijakan-kebijakan dan permasalahan-permasalahan, dan karenanya dapat berperan sebagai pelengkap yang berguna bagi sistem konsultasi APEC yang lebih resmi. Semua ini berarti bahwa jalan yang terbaik untuk mengatur kerjasama regional di Asia-Pasifik adalah mengaitkan berbagai organisasi dan forum, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam suatu jalinan organisasi-organisasi yang saling menunjang.

Perkembangan-perkembangan di Eropa Timur

Perubahan-perubahan besar sedang berlangsung di Eropa Timur. Seluruh dunia dengan penuh perhatian menyaksikan pesatnya perubahan ekonomi dan politik di kawasan Eropa. Tak seorang pun memperkirakan bahwa perubahan yang demikian mendasar dan besar akan terjadi dalam jangka waktu yang begitu singkat. Negara-negara di Asia-Pasifik sudah seharusnya memikirkan implikasi-implikasi apakah yang akan ditimbulkan oleh perkembangan.

Sejauh menyangkut Indonesia, terbukanya pasaran Eropa Timur memberikan peluang baru untuk peningkatan substansial ekspor ke kawasan itu. Ini merupakan peru-

bahan yang sewajarnya disambut gembira karena memungkinkan negara-negara seperti Indonesia mendiversifikasikan pasaran ekspornya, yang pada gilirannya akan menguatkan basis ekspornya. Diperkirakan bahwa suatu Eropa Timur yang lebih berorientasi pasar akan menyerap volume barang dagangan lebih besar yang dapat disediakan Indonesia secara kompetitif, seperti minyak nabati, sabun maupun deterjen, dan alat-alat kecantikan. Beberapa perusahaan Indonesia baru-baru ini sudah menandatangani suatu persetujuan usaha patungan dengan rekan usahanya di Uni Soviet, untuk mendirikan industri di negara itu guna mengolah bahan mentah minyak sawit dari Indonesia. Berbagai macam barang konsumsi dapat dihasilkan dari minyak kelapa sawit yang bisa dipasarkan di Uni Soviet. Usaha-usaha serupa dapat dilakukan, misalnya dalam industri-industri berbahan mentah karet atau hasil pertanian yang lain.

Sementara keprihatinan telah terungkap atas kemungkinan berkurangnya arus modal dari Eropa Barat ke Indonesia, jikalau para investor dan pemerintah di Eropa Barat memfokuskan perhatian mereka pada pasar Eropa Timur yang sangat potensial. Mungkin ada dasar riil untuk keprihatinan ini, meskipun masih belum pasti bahwa arus modal ke Asia-Pasifik akan merosot secara substansial. Prospek untuk pertumbuhan kuat secara berkesinambungan di kawasan ini adalah sangat baik. Untuk jangka pendek sampai menengah peluang-peluang bisnis dan investasi di seluruh kawasan Asia Timur dan Tenggara mungkin tetap menarik bagi para investor potensial.

Bahkan sekalipun daya tarik Eropa Timur menjadi terlalu kuat, negara-negara di bagian dunia sini seharusnya dapat mengerahkan cukup tabungan dari dalam ka-

